

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dengan adanya globalisasi bentuk kejahatan *human trafficking* mulai berkembang dari antar wilayah dalam negara hingga melewati lintas batas negara. Kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia dan Malaysia adalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara illegal. Kasus TKI illegal ini marak terjadi di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Faktor penyebab terjadinya kasus pengiriman TKI illegal di Indonesia adalah faktor ekonomi, sosial dan pendidikan. Pada faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya *human trafficking* ini adalah kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat lebih tinggi dibandingkan wilayah Kalimantan yang lain. Pada faktor sosial, terjadi sebuah ketimpangan antar satu daerah dengan daerah yang lain. Ketimpangan ini terjadi antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan akibat dari tidak meratanya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ketimpangan ini juga dialami antar wilayah perbatasan Malaysia dengan wilayah perbatasan di Indonesia. Dan pada faktor pendidikan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang memiliki pendidikan rendah akibat dari lemahnya pendidikan di Indonesia dan minimnya sarana prasarana sekolah di wilayah perbatasan. Sedangkan, di Malaysia yang menyebabkan terjadinya *human trafficking* adalah kebutuhan Malaysia akan pekerja migran pada sektor non formal akibat dari ledakan perekonomian dan industrialisasi negara tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut, adapun faktor lain yang membantu terjadinya *human trafficking* di Kalimantan Barat dan Sarawak yaitu, wilayah perbatasan itu sendiri. Wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak terkesan lemah sehingga menciptakan jalur illegal atau disebut juga sebagai “jalur tikus” yang membantu proses pengiriman tenaga kerja illegal dari Indonesia menuju Malaysia. Munculnya kasus tenaga kerja illegal

Indonesia di Malaysia ini memberikan dampak buruk bagi kedua negara. Di Indonesia permasalahan ini menyebabkan Indonesia kehilangan penduduknya akibat dari perpindahan penduduk yang tidak tercatat secara legal. Kedua, beberapa dari tenaga kerja illegal ini mengalami ketidakadilan dan kekerasan sehingga mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Di Malaysia, dampak buruk yang di akibatkan oleh tenaga kerja illegal ini berupa meningginya persaingan pekerjaan pada kelas menengah kebawah seperti tenaga pekerja lokal dan serikat buruh lokal.

Munculnya fenomena *human trafficking* di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak ini menyadarkan kedua negara bahwa ancaman non tradisional tidak dapat di selesaikan secara sepihak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama yang efisien dan berkelanjutan untuk menangani permasalahan ini. Dalam implementasinya, Indonesia dan Malaysia membuat kerjasama *General Border Committee* (GBC) untuk menangani permasalahan di wilayah perbatasan. Upaya yang dilakukan GBC dalam menanggulangi *human trafficking* di Kalimantan Barat dan Sarawak terbagi menjadi dua yaitu bidang operasi dan non operasi. Kegiatan bidang operasi dilakukan oleh *Coordinated Operation Control Committee* (COCC) dan *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC). Kegiatan dalam bidang operasi berupa latihan bersama, pembangunan pos pengawasan gabungan di wilayah perbatasan, dan patrol bersama di wilayah darat dan udara. Upaya-upaya yang dilakukan dalam bidang operasi ini dilakukan sebagai langkah utama dalam mencegah terjadinya *human trafficking* di wilayah perbatasan, terutama pada jalur illegal di Kalimantan Barat dan Sarawak. Sedangkan pada kegiatan non operasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek), berupa kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Kerjasama pada bidang ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sehingga dapat mencegah munculnya faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya *human trafficking*. COCC, JPCC dan

KK Sosek rutin melakukan kegiatan dan pertemuan setiap tahunnya baik di dalam ataupun diluar sidang umum GBC untuk memaksimalkan kerjasama keamanan yang telah di agendakan sebelumnya. Pada tahun 2015 hingga 2019 terjadi sebuah penurunan pada angka pekerja migran Indonesia di Malaysia. Hal tersebut membuktikan bahwa kerjasama ini terbukti cukup efektif dalam menjalankan perannya sebagai kerjasama keamanan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, kerjasama *General Border Committee* (GBC) dalam menanggulangi permasalahan *human trafficking* di perbatasan Indonesia-Malaysia dapat dikatakan berhasil.

6.2 Saran

Kerjasama *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) dalam upaya penanganan keamanan kawasan perbatasan terhadap ancaman *human trafficking*, tenaga kerja illegal Indonesia di Malaysia sudah membuahkan hasil yang positif bagi kedua negara. Sehingga saran yang dapat penulis berikan adalah untuk tetap mempertahankan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya. Kedua negara perlu meningkatkan kerjasama dalam bidang non operasional seperti dalam hal komunikasi, Indonesia dan Malaysia perlu meningkatkan pertemuan pembahasan kerjasama minimal tiga kali dalam setahun sehingga permasalahan tenaga kerja illegal ini dapat diatasi secara lebih efektif lagi. Selain itu, tingkatkan juga kerjasama dalam faktorsosial budaya serta pendidikan di wilayah perbatasan antar kedua negara.